

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGATURAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015
DI SUMATERA BARAT**

TESIS

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sciences
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Pembimbing I : Dr. Asrinaldi, M.Si

Pembimbing II : Dr. Aidinil Zetra, MA

**PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017

ABSTRAK

Nama : Ira Novita
Program Studi : Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Dana
Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di
Sumatera Barat

Walaupun persoalan dana kampanye sudah diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015, dan hasil audit oleh KAP menyatakan laporan peserta pemilihan diterima dan sudah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi masyarakat tetap tidak percaya dan menilai kandidat tidak jujur dalam melaporkan dana kampanyenya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye pada pemilihan kepala Daerah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat, dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menyebabkan sulitnya implementasi kebijakan dana kampanye tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengikuti model penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mekanisme wawancara mendalam dan melakukan studi dokumen. Untuk menganalisis implementasi kebijakan dana kampanye, digunakan teori Grindle. Penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye pada pemilihan kepala Daerah tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat belum berjalan dengan efektif. Faktor pengawasan/monitoring dari masyarakat, rendahnya perhatian badan legislatif terhadap isu pengaturan dana kampanye ini, serta masalah perilaku politik pasangan calon, dan terakhir tidak efektifnya jaringan komunikasi dalam proses implementasi menjadi faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengaturan Dana Kampanye, Pemilihan Kepala Daerah.



ABSTRACT

Name : Ira Novita
Program Study : Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
Title : Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Dana
Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di
Sumatera Barat

Despite the issue of the campaign budget has been set in regulation number 8 year 2015 and regulation of general election committee number 8 year 2015, and the outcome of the audit process of the Public Accountant Office stated the result of election's audiences accepted and suited with the regulation, the society still did not believe and assessed that the candidates were being dishonesty on reporting their campaign budget. Therefore, this research is design to describe the implementation of campaign financing management regulation in local head election of 2015 at West Sumatera Province, and to analyze which factors support and hinder the implementation of the campaign budget policy. The research is using qualitative approach and following the case study reseach model. The data collection is conducted using in-depth interview mechanism and document study. To analyze the implementation of campaign budget policy, the theory from Grindle will be utilised. This research describe that the implementation of the policy of budget campaign management in the local head election in West Sumatera has not been run effectively. The monitoring from the society, the lower of the legislation body attention of the campaign budget management issue, the political behaviour of the candidates, and the in efectiveness become factors which hinder the implementation of campaign budget management regulation on Governor and Vice Governor Election, also Mayor and Vice-Mayor Election in 2015 at West Sumatera.

Keyword: Policy Implementation, Campaign Financing Management Regulation, Local Head Election.

